

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Bisaryadi. 2016. "Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar". Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan*. UBB Press. Bangka Belitung.
- C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their Histoery and Existing Form*, Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung.
- Grita Anindarini, Antonius Aditanyo, Adrianus Eryan dan Marsya Mutmainah, *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta.
- Hadi Supratikta. 2015. "Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut". Laporan Akhir Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- H. M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiq. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2008. *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*. Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- Mexsasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Rafika Aditama. Jakarta.

- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moh. Mahlud MD. 1999. *Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Pargulatan Polttik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta.
- Miriam Budiardji. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Pertama Aksara. Jakarta.
- Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Rachmat Trijono. 2015. *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administari Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- dan Erlies Septiana Nubain. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem dkk. 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.

Karya Ilmiah

- Ahmad Yani, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran JIKH Volume 12 Nomor 2 Juli 2018.

- Ahmad Aziz. “Reduksi Otonomi Seluas-luasnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 4 Nomor 2, Desember 2008.
- Ateng Syafruddin. 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab”. Jurnal Pro Justicia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Iqbal Shalihin, “Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Oktavianu Pasang, 2018, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Loloi Di Kabupaten Toraja Utara”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Rizkyana Zaffrindra Putri. 2015. “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Viktor I. Suripatty. 2009. “Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia: Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral”. Tesis. Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Dokumen

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949-1950 RIS,(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3 du. 6 Peb. '50).

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Edaran Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Minerba

Surat Edaran Nomor 809/30.01/DJB/2020 tentang Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba

Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Nasakah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Naskah Akademik Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebae85ed139d/mengintip-15-poin-penting-dalam-uu-minerba-hasil-revisi/> diakses pada 14 September 2020.

<https://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptumpp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf>, pada 28 Oktober 2021.